

**EVALUASI PERUBAHAN KURIKULUM 2013 KE KURIKULUM MERDEKA
TERHADAP PRAKTIK PEMBELAJARAN PPKN DI SEKOLAH
SMA NEGERI 1 MUARO JAMBI**

Putri Sitanggang¹, Heri Usmanto², Dona Sariani³

^{1,2,3}Universitas Jambi

¹putrisitanggang2021@gmail.com, ²heri.usmanto@unja.ac.id,

³donasariani@unja.ac.id

ABSTRACT

The curriculum change from the 2013 Curriculum to the Independent Curriculum is one of the government's efforts to improve the quality of education in Indonesia. This study aims to assess these changes in the learning practices of Pancasila and Citizenship Education (PPKn) at SMA Negeri 1 Muaro Jambi. This curriculum change impacts the role of teachers, learning strategies, and student engagement in the learning process. This study used a qualitative approach with the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The research subjects consisted of PPKn teachers, the vice principal for curriculum, and students. Data analysis was conducted descriptively qualitatively through the stages of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results show that, from a contextual perspective, the implementation of the Independent Curriculum is in line with the needs of 21st-century learning. From an input perspective, teacher readiness and facilities still need to be improved. In terms of process, learning has become more flexible and student-focused, although there are still problems in developing open modules. Meanwhile, in terms of product, there has been an increase in student participation and critical thinking skills. Thus, the curriculum changes have a positive impact on PPKn learning, but there is still a need for improvement in its implementation.

Keywords: Evaluation, 2013 Curriculum, Independent Curriculum, PPKn, CIPP Model

ABSTRAK

Perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka adalah salah satu cara pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menilai perubahan tersebut terhadap praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Perubahan kurikulum ini berdampak pada peran guru, strategi pembelajaran, dan melibatkan siswa dalam proses belajar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Proses, Product). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan subjek penelitian terdiri dari guru PPKn, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahap reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi konteks, pelaksanaan

Kurikulum Merdeka sesuai dengan kebutuhan pembelajaran abad 21. Dari aspek input, kesiapan guru dan sarana masih harus ditingkatkan. Pada aspek proses, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan fokus pada siswa, meskipun masih ada masalah dalam penyusunan modul terbuka. Sementara itu, pada aspek produk, terjadi peningkatan partisipasi dan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, perubahan kurikulum memberi dampak positif pada pembelajaran PPKn, namun masih perlu perbaikan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Evaluasi, Kurikulum 2013, Kurikulum Merdeka, PPKn, Model CIPP

A. Pendahuluan

Perubahan dalam kurikulum adalah suatu hal yang tidak bisa dihindari dalam sistem pendidikan di Indonesia. Hal ini karena kurikulum perlu disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan dalam teknologi, serta kebutuhan yang berubah-ubah dari masyarakat. Perubahan dalam kurikulum itu penting agar proses belajar mengajar dapat menghasilkan lulusan yang bisa beradaptasi dan memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan di zaman sekarang.

Dalam hal ini, sistem pendidikan harus melakukan penyesuaian agar materi, cara mengajar, dan tujuan pembelajaran tetap sesuai dengan perubahan sosial dan perkembangan global. Maka dari itu, perubahan kurikulum bukan hanya sekedar langkah teknis, tetapi juga merupakan strategi yang sangat penting untuk

meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan tujuan pendidikan nasional dapat tercapai dengan baik. Perubahan kurikulum adalah bagian dari usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional agar bisa memenuhi tantangan zaman. Peralihan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka adalah salah satu bentuk reformasi pendidikan yang fokus pada pembelajaran yang berpusat pada siswa, fleksibel guru, dan penguatan kompetensi abad ke-21. Kurikulum Merdeka dibuat untuk memberi kebebasan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan pembelajaran yang relevan, berbeda-beda, dan berorientasi pada capaian pembelajaran (CP) (Kemendikbudristek, 2022).

Namun, dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya pada pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), masih ada berbagai masalah. Secara

teoretis, pembelajaran PPKn dalam Kurikulum Merdeka diharapkan dapat membentuk peserta didik yang memiliki karakter kebangsaan, berpikir kritis, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokratis (Suryadi, 2021). Akan tetapi, keadaan nyata di sekolah menunjukkan adanya perbedaan (gap) antara harapan tersebut dengan praktik pembelajaran yang terjadi. Berdasarkan hasil observasi awal, masih terlihat bahwa beberapa guru menghadapi kesulitan dalam memahami konsep pembelajaran yang berbeda-beda dan penyusunan modul ajar berdasarkan Kurikulum Merdeka. Selain itu, proses pembelajaran PPKn masih lebih mengutamakan metode ceramah dan belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif siswa. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan kurikulum belum sepenuhnya diikuti dengan perubahan cara mengajar di kelas.

Perbedaan signifikan lainnya terlihat pada sistem penilaian atau asesmen. Kurikulum 2013 lebih cenderung memakai penilaian yang berbasis angka dan hasil belajar kognitif. Mulyasa (2018) menjelaskan bahwa

dalam sistem penilaian kurikulum 2013, pencapaian kompetensi pengetahuan diukur secara kuantitatif, yang ditunjukkan dengan nilai berbentuk angka. Hal ini juga ditegaskan oleh Hosnan (2016), yang menyatakan bahwa meskipun kurikulum 2013 mencakup penilaian untuk sikap dan keterampilan, dalam praktiknya, penilaian kognitif melalui tes tertulis masih menjadi bagian utama dari evaluasi pembelajaran siswa.

Disamping itu, Permendikbud No. 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan juga menunjukkan bahwa penilaian pengetahuan tetap menjadi elemen utama dalam sistem evaluasi pembelajaran. Sedangkan kurikulum merdeka lebih memprioritaskan asesmen formatif dan diagnostik yang menekankan pada proses, perkembangan, dan pencapaian kompetensi siswa secara menyeluruh. Dengan hal ini, penilaian tidak hanya mengukur hasil akhir, tetapi juga perkembangan cara berpikir dan karakter siswa (Direktoral Jenderal PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 2022).

Temuan ini menunjukkan adanya perbedaan antara kebijakan kurikulum

secara nasional dengan kondisi nyata di lapangan, terutama terkait kesiapan sarana prasarana, akses teknologi, serta kualitas peserta didik. Selain itu, ketidaksiapan guru dalam memahami dan melaksanakan kurikulum baru juga menjadi faktor penghalang utama dalam kesuksesan pembelajaran PPKn. Secara teoretis, keberhasilan pelaksanaan kurikulum sangat dipengaruhi oleh kesiapan komponen pendukung seperti guru, fasilitas, dan lingkungan belajar. Hal ini sejalan dengan pendapat Stufflebeam (2007) dalam model evaluasi CIPP, yang menekankan bahwa aspek input (kesiapan sumber daya) dan proses (pelaksanaan program) menjadi faktor penting dalam menentukan kesuksesan atau suatu program pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelian evaluatif yang bertujuan untuk menganalisis dan menilai perubahan dari Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka terhadap praktik pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada

pemahaman mendalam mengenai fenomena yang terjadi di lapangan, terutama terkait penerapan kurikulum dalam proses pembelajaran.

Model evaluasi yang diterapkan dalam penelitian ini adalah model CIPP (*Context, Input, Process, Product*). Model ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai pelaksanaan kurikulum, mulai dari konteks kebijakan, kesiapan, sumber daya, proses pelaksanaan, hingga hasil yang dicapai. Evaluasi konteks (*context*) digunakan untuk menganalisis latar belakang dan kebutuhan penerapan Kurikulum Merdeka. Evaluasi input (*input*) berfokus pada kesiapan guru, sarana dan prasarana, serta perangkat pembelajaran. Evaluasi proses (*process*) mengkaji pelaksanaan pembelajaran PPKn di kelas. Sementara itu, evaluasi produk (*product*) menilai hasil pembelajaran dan dampak perubahan kurikulum terhadap peserta didik.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: (1) observasi, untuk melihat langsung proses belajar PPKn di kelas setelah penerapan Kurikulum Merdeka. (2) wawancara,

secara mendalam dengan guru PPKn, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik untuk mendapatkan informasi tentang pengalaman, masalah, serta pandangan terhadap perubahan kurikulum. (3) dokumentasi, untuk mengumpulkan data berupa alat pembelajaran seperti modul ajar, RPP/ATP, dan dokumen pendukung lainnya.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana hasil reduksi data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif yang sistematis. Pembahasan dalam penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah utama, yaitu bagaimana evaluasi perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka terhadap praktik pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Muaro Jambi. Secara khusus, pembahasan diarahkan pada empat indikator berdasarkan model evaluasi CIPP, yaitu konteks perubahan kurikulum, kesiapan sumber daya, proses pelaksanaan pembelajarann, serta hasil pembelajaran yang diperoleh.

Melalui hasil wawancara yang dilakukan dengan guru PPKn, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, dan

peserta didik, penelitian ini mengkaji secara mendalam bagaimana peran guru dalam merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pelajaran PPKn pada masa transisi kurikulum, serta bagaimana strategi yang digunakan dalam meningkatkan pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Dengan begitu, pembahasan ini tidak hanya menggambarkan pelaksanaan Kurikulum Merdeka, tetapi juga menganalisis efektivitasnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Muaro Jambi.

1 Konteks Perubahan (Context)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, kebijakan pendidikan nasional, serta usaha untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Hal ini sejalan dengan konsep evaluasi konteks dalam model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam, yang menyatakan bahwa evaluasi konteks bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, dan peluang yang menjadi dasar suatu program (Stufflebeam, 2007).

Kebijakan Kurikulum Merdeka sendiri adalah bagian dari program Merdeka Belajar yang menekankan fleksibilitas pembelajaran, penguatan karakter dengan Profil Pelajar Pancasila (8 Dimensi Profil Kelulusan), dan pemulihan pembelajaran setelah pandemi (Kemendikbudristek, 2022). Temuan penelitian menunjukkan bahwa sekolah menerapkan kurikulum sebagai bentuk kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan juga sebagai akibat dari statusnya sebagai sekolah percontohan. Hal ini sesuai dengan pandangan Fullan (2007) yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi perubahan pendidikan sangat bergantung pada kesiapan institusi dan dukungan kebijakan yang kuat.

Dari sisi peserta didik, Kurikulum Merdeka dianggap mampu meningkatkan partisipasi dan pemahaman belajar. Hal ini sejalan dengan teori konstruktivisme yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika peserta didik secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman belajar (Piaget, 1970; Vygotsky, 1978). Dengan demikian,

dalam konteksnya implementasi Kurikulum Merdeka telah relevan dengan kebutuhan pembelajaran abad ke-21 yang menekankan *critical thinking*, *collaboration*, *communication*, dan *creativity*.

2. Kesiapan Sumber Daya (Input)

Pada aspek input, kesiapan sumber daya dalam penerapan Kurikulum Merdeka tergolong cukup baik, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari sisi kompetensi guru sebagian besar guru telah memahami konsep dasar Kurikulum Merdeka, termasuk pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Hal ini didukung dengan adanya program pelatihan dan supervisi yang dilakukan secara rutin oleh pihak sekolah. Namun, ada hambatan dalam hal dinamika kebijakan, terutama perubahan Capaian Pembelajaran (CP) yang terjadi dengan cepat. Ini membuat guru harus melakukan penyesuaian berulang dalam perencanaan pembelajaran. Keadaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara kompetensi guru cukup siap, stabilitas kebijakan masih menjadi tantangan dalam penerapan kurikulum.

Dari sisi sarana dan prasarana, ketersediaan perangkat pembelajaran

seperti modul ajar dan bahan ajar sudah ada, tetapi belum sepenuhnya mendukung pembelajaran yang inovatif. Penggunaan media pembelajaran juga masih terbatas, dimana pembelajaran lebih banyak memanfaatkan sumber dari internet dibandingkan penggunaan media interaktif seperti video atau presentasi. Ini menunjukkan bahwa penguatan pada aspek teknologi dan media pembelajaran masih diperlukan untuk mendukung efektivitas Kurikulum Merdeka.

3. Proses Pelaksanaan (*Process*)

Hasil penelitian pada aspek proses menunjukkan bahwa pembelajaran PPKn telah beralih ke pendekatan *student-centered learning*, di mana peserta didik lebih aktif terlibat dalam pembelajaran melalui diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Menurut Stufflebeam (2007), evaluasi proses bertujuan untuk menilai pelaksanaan program serta mengidentifikasi hambatan yang terjadi selama implementasi. Pendekatan pembelajaran yang berfokus pada siswa ini sejalan dengan konstruktivisme sosial dari Vygotsky (1978), yang menekankan pentingnya interaksi sosial dalam proses

pembelajaran. Melalui diskusi dan kerja kelompok, peserta didik dapat menyusun pemahaman secara kolaboratif. Selain itu, pendekatan ini juga sesuai dengan konsep *active learning* yang dikemukakan oleh Bonwell dan Eison (1991), yang menyatakan bahwa pembelajaran akan lebih efektif ketika peserta didik aktif secara kognitif dan sosial.

Dalam hal penilaian, guru telah menerapkan asesmen formatif dan sumatif secara terus-menerus. Hal ini sesuai dengan prinsip asesmen dalam Kurikulum Merdeka yang menekankan pada asesmen sebagai bagian dari proses pembelajaran. Asesmen formatif yang digunakan sepanjang proses pembelajaran terbukti dapat membantu guru dalam memantau kemajuan peserta didik dan memberikan umpan balik yang berguna. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa variasi metode pembelajaran masih terbatas. Hal ini menunjukkan perlunya inovasi dalam strategi pembelajaran. Menurut Joyce dan Weil (2009), penggunaan model pembelajaran yang beragam dapat meningkatkan kualitas pembelajaran

dan mengakomodasi berbagai gaya belajar peserta didik.

4 Hasil Pembelajaran (*Product*)

Pada hasil pembelajaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap hasil belajar peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Hal ini sesuai dengan tujuan evaluasi produk dalam model CIPP yang bertujuan untuk menilai efektivitas dan dampak suatu program (Stufflebeam, 2007). Peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kemampuan berpikir kritis, keaktifan, serta pemahaman nilai-nilai kewarganegaraan. Hal ini sesuai dengan tujuan pembelajaran PPKn yang tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pengembangan karakter dan sikap sebagai warga negara (Winataputra, 2012).

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tetapi juga pada proses belajar. Hal ini sesuai dengan konsep penilaian otentik yang dikemukakan oleh Wiggins (1998), yang menekankan bahwa penilaian harus mencerminkan

kemampuan nyata peserta didik dalam konteks kehidupan sehari-hari. Namun, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara hasil ujian akhir dengan kemampuan peserta didik dalam proses belajar. Hal ini menunjukkan bahwa sistem penilaian masih perlu diperbaiki. Menurut Nitko dan Brookhart (2011), sistem penilaian yang baik harus valid, reliabel, dan mampu mencerminkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh. Selain itu, meskipun pembelajaran berpusat pada peserta didik dinilai efektif, tidak semua peserta didik mampu beradaptasi dengan cepat. Hal ini sesuai dengan teori diferensiasi pembelajaran oleh Tomlinson (2001), yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan yang bervariasi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai evaluasi perubahan Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka terhadap praktik pembelajaran PPKn di SMA Negeri 1 Muaro Jambi, yang dianalisis menggunakan model CIPP (*Context*,

Input, Process, Product), dapat disimpulkan sebagai berikut:

(1) Konteks Perubahan (*Context*), perubahan kurikulum dari Kurikulum 2013 ke Kurikulum Merdeka dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan pendidikan nasional, perkembangan zaman, serta peningkatan kualitas pembelajaran yang berfokus pada peserta didik. Implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Negeri 1 Muaro Jambi telah sesuai dengan kebijakan pemerintah dan didukung oleh status sekolah sebagai sekolah percontohan. Kurikulum ini dianggap relevan karena mampu meningkatkan keaktifan, kemandirian, serta kemampuan berpikir kritis peserta didik, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan proses adaptasi yang bertahap; (2) Kesiapan Sumber Daya (*Input*), kesiapan sumber daya dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka berada pada kategori cukup baik. Guru telah memiliki pemahaman yang cukup terkait konsep kurikulum serta mampu menyusun perangkat pembelajaran. Selain itu, sekolah juga memberikan dukungan melalui pelatihan dan supervisi secara berkala. Namun, masih terdapat

kendala dalam hal perubahan kebijakan, khususnya terkait revisi Capaian Pembelajaran (CP), serta keterbatasan dalam penggunaan media pembelajaran yang inovatif. Oleh karena itu, aspek input masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal; (3) Proses Pelaksanaan (*Process*), pelaksanaan pembelajaran PPKn telah mengarah pada pendekatan *student-centered learning*, dimana peserta didik lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator dengan menggunakan metode seperti diskusi, kerja kelompok, dan tanya jawab. Selain itu, asesmen telah dilakukan secara berkesinambungan melalui penilaian awal, proses, dan akhir pembelajaran. Meskipun demikian, variasi metode pembelajaran masih terbatas, sehingga perlu pengembangan strategi pembelajaran yang lebih inovatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran; (4) Hasil Pembelajaran (*Product*), hasil pembelajaran menunjukkan bahwa Kurikulum Merdeka memberikan dampak positif terhadap peningkatan hasil belajar peserta didik, baik dari aspek kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Peserta didik lebih aktif, kritis, serta memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap

nilai-nilai kewarganegaraan. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian antar hasil ujian akhir dengan kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga diperlukan perbaikan dalam sistem penilaian agar lebih mencerminkan kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Rahman, A. (2021). *Manajemen Perubahan Kurikulum di Era Digital Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Stufflebeam, D. L. (2007). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, and Applications*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winataputra, U. S. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Jurnal :

- Putra, A., & Widodo, T. (2021). *Learning Adjustment Difficulties pada Masa Transisi Kurikulum*. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 18(2), 89–102.

- Putra, Y., & Yuniarti, N. (2022). "Learning Shock pada Siswa selama Transisi ke Kurikulum Merdeka." *Jurnal Pendidikan Karakter*, 7(1), 33–47.
- Rahmawati, L., & Sari, D. P. (2022). Tantangan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Indonesia*, 11(3), 215–224.
- Rohmadi, T. (2022). Analisis Kesiapan Sekolah dalam Menghadapi Perubahan Kurikulum. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 9(3), 210–223.
- Sari, D. & Nurhasanah, A. (2023). Tantangan Guru PPKn dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Civic Education*, 7(1), 55–64.
- Suhendra, A. (2022). Dampak Implementasi Kurikulum Baru terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 4(2), 85–95.
- Suhendra, A. (2022). Dampak Implementasi Kurikulum Baru terhadap Motivasi Belajar Siswa. *Jurnal Pendidikan Nasional*, 4(2), 85–95.
- Wulandari, R. (2023). Kesiapan Guru dalam Implementasi Kurikulum Merdeka. *Jurnal Inovasi Pendidikan*, 7(1), 45–56.